

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025 BALAI KALIBRASI

KATA PENGANTAR



Tahun 2025 adalah awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi Tahun 2025 – 2029. Laporan Kinerja Interim Triwulan Balai kalibrasi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 triwulan I, dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Kepala Balai kalibrasi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 menyajikan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja Balai Kalibrasi. Dokumen ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Balai Kalibrasi tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim triwulan I tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja Balai Kalibrasi akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 30 April 2025

Kepala Balai Kalibrasi



Henry Handoyo

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025 BALAI KALIBRASI

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Kalibrasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis Triwulan I pada Tahun 2025 mengacu pada Renstra Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang dievaluasi, hanya 1 (satu) sasaran strategis yang bisa dievaluasi karena realisasi indikator dari 2 (dua) sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh sesuai penilaian di akhir tahun. Dari sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh bahwa hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi triwulan I sebesar 101,47%.
2. Capaian Indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar sebesar 90,70%.
3. Belum ada capaian indikator Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada triwulan IV namun Balai Kalibrasi tetap melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Kegiatan Forum Konsultasi Publik 2025 dan telah menindaklanjuti saran dan masukan pelanggan pada Forum Konsultasi Publik 2024.
4. Belum ada capaian indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada triwulan IV namun Balai Kalibrasi tetap melakukan movev setiap triwulannya.
5. Belum ada capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada triwulan IV.
6. Belum ada capaian indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi, hasil akan diperoleh pada triwulan IV.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya Balai Kalibrasi memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.064.043.000,00 (Lima milyar enam puluh empat juta empat puluh tiga ribu rupiah). Pada awal triwulan I terdapat efisiensi anggaran DIPA menjadi Rp 2.697.159.000,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan triwulan I, dari 6 (enam) indikator kinerja Balai Kalibrasi, ada 2 (dua) indikator kinerja yang pengukurannya per triwulan dan 4 (empat) indikator kinerja memiliki target di akhir tahun, sehingga belum bisa dilakukan perhitungan pada triwulan I, meskipun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai target di akhir tahun. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, Balai Kalibrasi harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.
2. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Kalibrasi triwulan I tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja Balai Kalibrasi antara lain:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja berbasis digital, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Kegiatan secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Balai Kalibrasi periode 2025.

HIGHLIGHT KINERJA

Pada triwulan I tahun 2025 Balai Kalibrasi menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Layanan Publik Era Baru: Digital, Transparan, dan Responsif”. Kegiatan FKP ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah antara Balai Kalibrasi dan *stakeholder* untuk peningkatan kualitas Layanan Kalibrasi secara digital melalui INFALABS dan DIKOLABORASI, yang transparan dan responsif menyajikan solusi.

FKP dilaksanakan tanggal 17 April 2025 sebagai kegiatan kolaborasi 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPOMN secara *hybrid* (*daring* dan *luring*) dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal Balai Kalibrasi. Kegiatan ini mencakup pembukaan dan arahan dari Kepala Balai Kalibrasi, penyampaian pengantar pelayanan publik dan terobosan layanan publik, tindak lanjut FKP tahun 2024, tindak lanjut hasil SKM dan pengaduan pelanggan tahun 2024, perubahan Standar Pelayanan Publik tahun 2025, pemberian saran dan masukan dari perwakilan *stakeholder* terhadap Standar Pelayanan, pemberian reward pelanggan tertib administrasi tahun 2024 dan petugas layanan terbaik triwulan I 2025, pemberian *doorprize* dan pengumuman pemenang kuis pelayanan publik, dan penyampaian kesimpulan.

Balai Kalibrasi berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan Publik yang prima selalu responsif, transparan dan dengan melaksanakan transformasi digital. Transformasi digital telah dilakukan dan selalu dikembangkan dengan inovasi-inovasi fitur antara lain “Notifikasi Status Pengajuan Layanan Kalibrasi pada DIKOLABORASI”.

Pada diskusi FKP ini telah disepakati identifikasi masalah berdasarkan saran dan masukan dari *stakeholder*, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen janji perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam Berita Acara FKP dan ditandatangani oleh Balai Kalibrasi dan perwakilan *stakeholder*.



Gambar 1. Foto Bersama Panitia Forum Konsultasi Publik 2025



Gambar 2. Forum Konsultasi Publik 2025 secara hybrid di Aula PPPOMN



Gambar 3. Forum Konsultasi Publik 2025 secara hybrid melalui zoom meeting



Gambar 4. Pembukaan Forum Konsultasi Publik 2025 oleh Bapak Henry Handoyo mewakili Ibu Susan Gracia Arpan selaku Kepala PPPOMN

Balai Kalibrasi BPOM berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Rencana kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Kalibrasi mencakup berbagai aspek, seperti manajemen perubahan ada 16 Rencana Kerja, penguatan tatalaksana ada 21 Rencana Kerja, sistem manajemen SDM aparatur ada 25 Rencana Kerja, akuntabilitas ada 9 Rencana Kerja, pengawasan ada 19 Rencana Kerja, peningkatan kualitas layanan publik ada 24 Rencana Kerja, serta peran Agent of Change (AOC) ada 6 Rencana Kerja.

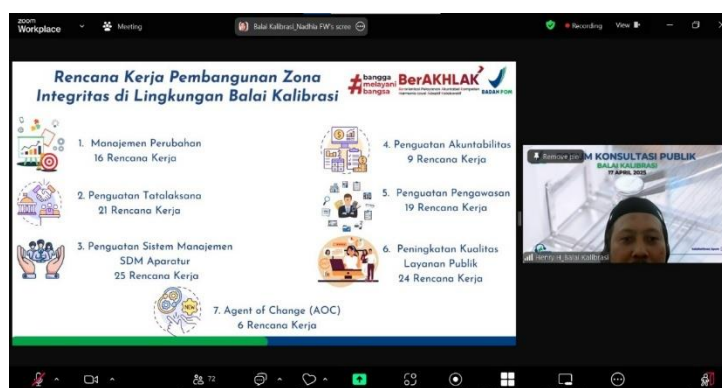
Dalam rangka Penguatan Komitmen Balai Kalibrasi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM, Balai Kalibrasi menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang telah diselenggarakan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Maret 2025 dengan mengundang *stakeholder* internal dan tanggal 17 April 2025 bersamaan dengan kegiatan FKP dengan peserta *stakeholder* internal dan eksternal.



Gambar 5. Pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Balai Kalibrasi BPOM pada tahun 2025



Gambar 6. Penandatanganan banner Pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas oleh pegawai dan stakeholder Balai Kalibrasi BPOM



Gambar 7. Pemaparan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kepala Balai Kalibrasi BPOM



Gambar 8. Informasi terkait maklumat pelayanan, rencana kerja pembangunan Zona Integritas, layana pegaduan serta survey kepuasan pelanggan Balai Kalibrasi BPOM

Balai Kalibrasi telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kinerja Organisasi melalui pembuatan dan penggunaan situs SISKAL KAREN (Sistem Informasi Balai Kalibrasi Kinerja dan Perencanaan). Situs ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data kinerja mencakup dokumen Perencanaan, Anggaran, Monev Kinerja, SK, dan Surat-surat.



Gambar 9. Homepage aplikasi SISKAL KAREN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT KINERJA	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4. ISU STRATEGIS	4
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	6
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	10
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	11
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	12
2.5. METODE PENGUKURAN	14
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.3. REALISASI ANGGARAN	29
3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	31
3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	31
BAB IV	
PENUTUP	32
4.1. KESIMPULAN	32
4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Foto Bersama Panitia Forum Konsultasi Publik 2025.....	iv
Gambar 2.	Forum Konsultasi Publik 2025 secara hybrid di Aula PPPOMN	v
Gambar 3.	Forum Konsultasi Publik 2025 secara hybrid melalui zoom meeting	v
Gambar 4.	Pembukaan Forum Konsultasi Publik 2025 oleh Bapak Henry Handoyo mewakili Ibu Susan Gracia Arpan selaku Kepala PPPOMN	v
Gambar 5.	Pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Balai Kalibrasi BPOM pada tahun 2025	vi
Gambar 6.	Penandatanganan banner Pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas oleh pegawai dan stakeholder Balai Kalibrasi BPOM.....	vi
Gambar 7.	Pemaparan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kepala Balai Kalibrasi BPOM.....	vi
Gambar 8.	Informasi terkait maklumat pelayanan, rencana kerja pembangunan Zona Integritas, layana pegaduan serta survey kepuasan pelanggan Balai Kalibrasi BPOM.....	vii
Gambar 9.	Homepage aplikasi SISKAL KREN	vii
Gambar 1. 1.	Struktur Organisasi Balai Kalibrasi	2
Gambar 1. 2.	Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 1. 3.	Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin	3
Gambar 1. 4.	Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan	4
Gambar 3. 1.	Rumus % Capaian	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko	9
Tabel 2. 2.	Rencana Kerja Tahunan 2025.....	11
Tabel 2. 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 2. 4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel 2. 5.	Metode Pengukuran	14
Tabel 3. 1.	Kategori Capaian Indikator Kinerja	16
Tabel 3. 2.	Predikat NKO	16
Tabel 3. 3.	Perhitungan NKO Balai Kalibrasi Triwulan I.....	17
Tabel 3. 4.	Kategori pencapaian indikator kinerja.....	18
Tabel 3. 5.	Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I.....	19
Tabel 3. 6.	Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan	20
Tabel 3. 7.	Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I	20
Tabel 3. 8.	Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya.....	21
Tabel 3. 9.	Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan	22
Tabel 3. 10.	Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan I dengan target tahunannya.....	23
Tabel 3. 11.	Pelaksanaan Kalibrasi di Balai Besar POM/ Balai POM/ Loka POM.....	24
Tabel 3. 12.	Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan.....	25
Tabel 3. 13.	Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya	25
Tabel 3. 14.	Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan.....	25
Tabel 3. 15.	Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya	26
Tabel 3. 16.	Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan.....	27

Tabel 3. 17. Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya	27
Tabel 3. 18. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan.....	28
Tabel 3. 19. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya	28
Tabel 3. 20. Tabel realisasi dan capaian (%) anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I	29
Tabel 3. 21. Tabel Tingkat Efisiensi	29
Tabel 3. 22. Perhitungan Tingkat Efisiensi Triwulan I	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Kalibrasi.....	33
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja (PK) Balai Kalibrasi	36
Lampiran 3.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Kalibrasi	38
Lampiran 4.	Surat Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi.....	42
Lampiran 5.	Laporan Ketersediaan Dana Detail s/d Maret TA 2025.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholders*.

Balai Kalibrasi sebagai salah satu unit kerja di BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran setiap triwulan dan setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Kalibrasi merujuk kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Kepala Balai Kalibrasi tahun 2025.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

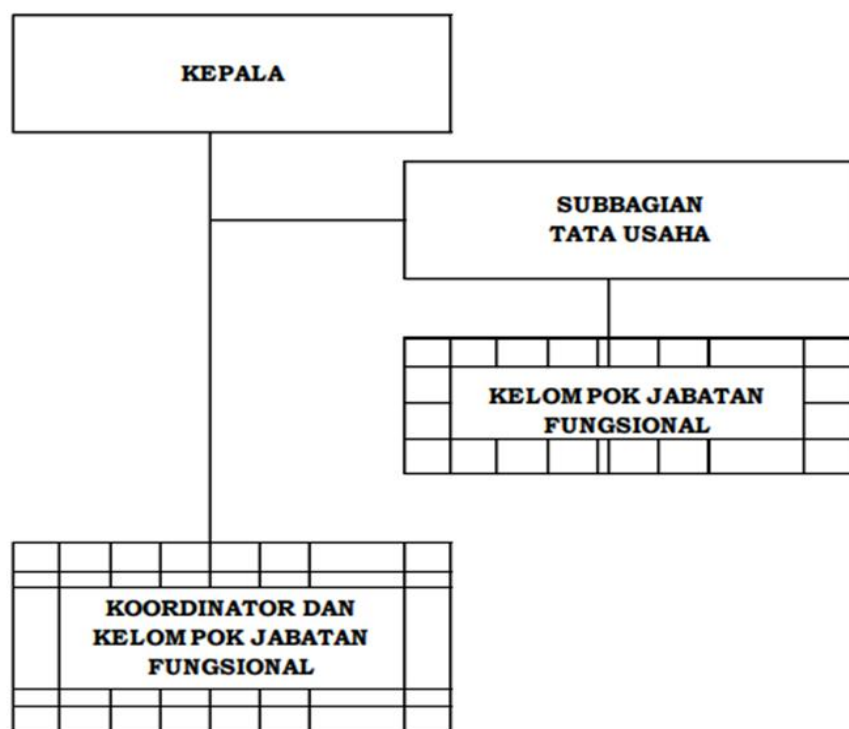
1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi;
3. pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium dan sarana prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Kalibrasi telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Balai Kalibrasi dipimpin oleh Kepala Balai dengan dibantu Kepala sub bagian tata usaha dan para pejabat fungsional sesuai masing-masing penugasannya.

Susunan organisasi Balai Kalibrasi terdiri atas: Kepala; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Balai Kalibrasi digambarkan seperti bagan berikut:

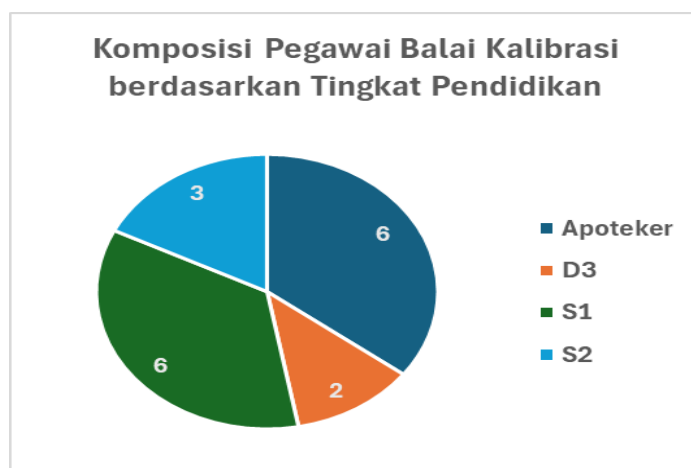


Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Kalibrasi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu.

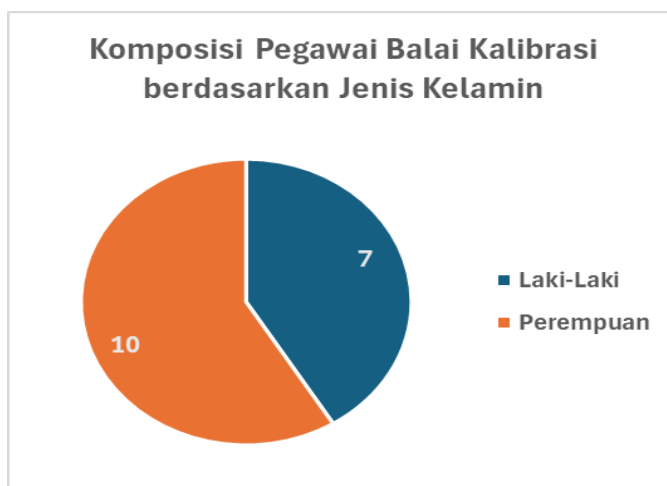
1.3.2 1.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang berpengaruh terhadap kinerja Balai Kalibrasi. Sebagai Satker baru, Balai Kalibrasi saat ini didukung oleh 17 pegawai yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan Magister sebanyak 3 (tiga) orang, Apoteker sebanyak 6 (enam) orang, Sarjana sebanyak 6 (enam) orang dan Diploma sebanyak 2 (dua) orang.



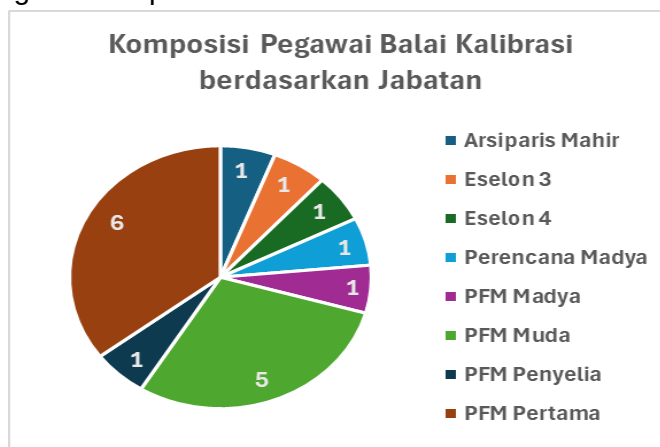
Gambar 1. 2. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Balai Kalibrasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 (tujuh) pegawai dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 (sepuluh) pegawai.



Gambar 1. 3. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kelompok jabatan, pegawai Balai Kalibrasi terdiri atas 1 (satu) pegawai Eselon 3, 1 (satu) pegawai Eselon 4, 1 (satu) pegawai Perencana Ahli Madya, 1 (satu) pegawai PFM Ahli Madya, 5 (lima) pegawai PFM Ahli Muda, 6 (enam) pegawai PFM Ahli Pertama, 1 (satu) pegawai PFM Penyelia, dan 1 (satu) pegawai Arsiparis Mahir.



Gambar 1. 4. Komposisi Pegawai Balai Kalibrasi berdasarkan Jabatan

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Kalibrasi perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran strategis, baik isu internal maupun eksternal. Isu internal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia Balai Kalibrasi

Saat ini, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai. Ditinjau dari analisis beban kerja, utamanya dalam upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja, Balai Kalibrasi masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 45 pegawai. Fokus pengelolaan SDM di Balai Kalibrasi adalah untuk mengembangkan pegawai Balai Kalibrasi yang semakin kompeten, dan handal untuk semakin meningkatkan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM di Balai Kalibrasi diantaranya adalah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, *on job training*, bimbingan teknis, maupun seminar-seminar berkaitan dengan kalibrasi.

2. Ruang Lingkup Kalibrasi

Perkembangan dunia kalibrasi yang dinamis menuntut Balai Kalibrasi untuk memastikan kehandalan, akurasi hasil, jaminan kualitas yang merujuk pada *good laboratory practice*, dan memperkaya ruang lingkup kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025:2017 guna menjawab tantangan perkembangan peralatan laboratorium.

3. Sarana prasarana

Sejalan dengan tantangan dan kebutuhan untuk penambahan ruang lingkup, maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium berupa ruangan laboratorium untuk masing-masing ruang lingkup, peralatan termasuk standar kalibrasi dan alat penunjang.

4. Balai Kalibrasi sebagai Center of Excellence & Collaboration of Measurements

Balai Kalibrasi sebagai pusat rujukan terkait ketertelusuran kebenaran nilai ukur terutama untuk peralatan laboratorium dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, *laboratory reference* dalam uji banding antar laboratorium kalibrasi, dan sistem pengukuran peralatan laboratorium BPOM.

Isu eksternal Balai Kalibrasi antara lain:

1. Kepuasan Pelanggan Balai Kalibrasi

Balai Kalibrasi merupakan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik berupa layanan kalibrasi kepada pelanggan baik internal maupun eksternal BPOM. Sebagai penyelenggara fungsi pelayanan publik, indikator utama yang dinilai adalah sejauh mana kepuasan dan pengelolaan keluhan pelanggan.

2. Pemanfaatan Peralatan Laboratorium Hasil Rekomendasi

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium berupa pengadaan peralatan laboratorium diawali dengan tahap perencanaan melalui permohonan rekomendasi perencanaan peralatan laboratorium untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi pengadaan peralatan laboratorium.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Visi, misi BPOM, tujuan, serta sasaran kegiatan Balai Kalibrasi sebagaimana tertuang di Rancangan Renstra Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:

Visi BPOM: “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi BPOM:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan Balai Kalibrasi 2025-2029:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu dengan kepastian dan ketertelusuran kebenaran nilai ukur peralatan laboratorium BPOM sehingga diperoleh hasil pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang valid sesuai komitmen BPOM dalam memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima. Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai Kalibrasi dalam memberikan layanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Balai Kalibrasi 2025-2029:

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, Balai Kalibrasi menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, dan target sebagaimana disajikan dalam tabel sasaran strategis berikut ini:

Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka dicantumkan dalam salah satu sasaran kinerja BPOM yaitu menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium dan verifikasi metode analisis yang telah dilakukan di Balai / Balai Besar POM yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian sediaan farmasi dan makanan merupakan peralatan yang telah ditetapkan sesuai standar peralatan pada SKL sesuai tingkatan laboratoriumnya, peralatan tersebut juga harus dalam kondisi yang baik dan reproduibel untuk itu sesuai persyaratan mutu peralatan yang digunakan harus dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar dengan target sebesar 100% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis ke-2: Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Balai Kalibrasi mendukung pelayanan publik BPOM dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Kalibrasi.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator IPP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 4,70 di tahun 2029.

Sasaran strategi ke-3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Balai Kalibrasi yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2025–2029, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Kalibrasi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Kalibrasi. Pada tahun 2025-2029, Balai Kalibrasi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Zona Integritas, Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Manajemen Risiko, dan Nilai SAKIP.

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Kalibrasi untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini diukur dengan indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi :

1. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

diharapkan Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi dengan target sebesar 76, di tahun 2029.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

3. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - a. Revisi DIPA (bobot 10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - d. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - g. Capaian Output (bobot 25%)
 - h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 - a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 - b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Balai kalibrasi membuat Target nilai Kinerja anggaran tahun 2029 sebesar 4.

Manajemen Risiko (ISO31000:2018), aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
2. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
3. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 2. 1. Tabel Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangkapenilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Balai Kalibrasi dengan target Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,2 di tahun 2029.

Nilai AKIP Balai Kalibrasi

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
4. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Nilai AKIP Balai Kalibrasi dengan target sebesar 80 di tahun 2029.

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra/Revisi Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan pada tahun berjalan. RKT disusun dan disahkan setelah rancangan Rencana Kerja Pemerintah di tahun $n+1$ terbit. RKT Satuan Kerja, Unit Kerja dan UPT disahkan setelah tanggal pengesahan RKT BPOM. Khusus RKT tahun pertama pelaksanaan Renstra (yang disusun pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra periode sebelumnya) disusun mengacu pada Rancangan Renstra.

Rencana kerja tahunan Balai Kalibrasi tahun 2025 berdasar *cascading log frame* dokumen RKT yang telah disahkan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Rencana Kerja Tahunan 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100
Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,51
Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,25
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	90
	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	3,2

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Balai Kalibrasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan. Berdasarkan hasil desk dengan unit pengampu, terdapat beberapa penyesuaian pada RKT antara lain penambahan indikator yaitu “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi” dan perubahan target indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 telah ditetapkan pada 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100
	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	89,37
Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4
	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,0

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember 2025. Capaian RAPK dilaporkan setiap triwulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Capaian RAPK dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Sesuai DIPA awal RAPK Balai Kalibrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	ANGGARAN
1	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi			88.07	88.07	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	988.872.000
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar			30	30	50	50	50	50	80	80	80	100	1.901.932.000
2	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima												4,4	100.000.000
3	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi												75	745.859.000
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi												4	1.283.760.000
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi												2,0	43.620.000
Total															5.064.043.000

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja Balai Kalibrasi mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM.

Pengukuran pencapaian masing-masing Indikator Kinerja di Balai Kalibrasi dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2. 5. Metode Pengukuran

NO	INDIKATOR KINERJA	METODE PENGUKURAN
1	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	Realisasi dihitung berdasar rata-rata nilai SKL Balai Kalibrasi, dengan pembobotan untuk masing – masing komponen sebesar
2	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	Realisasi dihitung berdasarkan jumlah alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi di tahun berjalan dibagi target tahun berjalan dikali 100%
3	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil survei terhadap enam aspek layanan publik PPPOMN: Kebijakan Pelayanan (30%) Profesionalitas SDM (18%) Sarana Prasarana (15%) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%) Konsultasi dan Pengaduan (15%) Inovasi (7%)
4	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi RB di Balai Kalibrasi dalam pembangunan ZI menuju WBK
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
6	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan yang telah dijalankan Balai Kalibrasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Balai kalibrasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi BPOM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan dari kewajiban Balai Kalibrasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM serta Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja Balai Kalibrasi dilakukan dengan cara menghitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 3. 1. Rumus % Capaian

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x < 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 3. 2. Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

Tabel 3. 3. Perhitungan NKO Balai Kalibrasi Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	88,07	89,37	101,47	101,47
		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	30	27,21	90,70	90,70
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK						192,17
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)						96,09
Predikat NKO						Baik

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK) pada triwulan I tahun 2025 sebesar 96,09 dengan predikat Baik. Balai Kalibrasi akan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan komitmen dan meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, misi, dan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang objektif dan transparan.

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja :

1. Menilai pencapaian tujuan organisasi.
2. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
3. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
4. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 3. 4. Kategori pencapaian indikator kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% \leq x < 100\%$	
Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$	

Tabel 3. 5. Perhitungan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target 2025	Target Triwulan I	Satuan	Realisasi	Capaian terhadap Target Triwulan I	Capaian terhadap target tahunan	Kategori
Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)								
1	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	88,07	nilai	89,37	101,47	100,00 	Tercapai/ melampaui
2	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100	30	Persen	27,21	90,70	27,21 	Perlu upaya keras
Sasaran Kegiatan 2. Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima								
3	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	-	indeks	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal								
4	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	-	nilai	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	-	nilai	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-
6	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	-	indeks	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 6 (enam) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kategori “tercapai/melampaui”. 1 (satu) IKU memperoleh kategori “perlu upaya keras” tetapi jika dibandingkan dengan target triwulan I masih dalam kategori “baik”. Hal tersebut dikarenakan target pada triwulan I sebesar 30%. Untuk 4 (empat) IKU lainnya belum dapat dinilai karena capaian dihitung pada akhir tahun.

SK 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) **IKSK 1. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi**

Standar Ruang Lingkup Laboratorium kalibrasi adalah acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium kalibrasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi; dan pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan

1. Standar Ruang Lingkup Standar Ruang Lingkup Balai Kalibrasi adalah acuan yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian obat dan makanan secara kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium.
2. Standar Peralatan adalah peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga kalibrasi dapat dilaksanakan sesuai lingkungannya.
3. Standar Kompetensi Laboratorium adalah kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten.

Cara perhitungan:

Nilai pemenuhan laboratorium Kalibrasi terhadap SKL = Rata-rata Nilai

= (75% x Nilai Pemenuhan SRL + 15 % Nilai Pemenuhan

Standar Kompetensi laboratorium + 10 % Nilai Pemenuhan Standar Peralatan) : 3

1. Nilai pemenuhan SRL kalibrasi = nilai pemenuhan SRL Kalibrasi, SRL kalibrasi ruang lingkup kalibrasi yang telah diakreditasi oleh KAN – BSN
2. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai kalibrasi = nilai pemenuhan standar Peralatan Balai kalibrasi yang akan dicapai pada kurun waktu rensta 2025-2029
3. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium balai kalibrasi = nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium balai kalibrasi

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 6. Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi KL	88,07	89,37	101,47	sangat baik 

Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi” triwulan 1 tahun 2025 dengan kategori sangat baik. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I

No	Komponen	Realisasi Triwulan I
1	Ruang lingkup	67,66
2	Standar Kompetensi Laboratirium	13,53
3	Standar Peralatan	8,18
Hasil Akhir		89,37

Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan komponen SRL yang ada dikarenakan adanya efisiensi anggaran maka peningkatan kompetensi dalam rangka penambahan ruang lingkup mengalami penundaan sehingga hasil komponen tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Capaian indikator ini sebesar $89,37/88,07 \times 100\% = 101,47\%$.

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 8. Realisasi kinerja Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	89,37	100,00	 Baik

c. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terus dilakukan Balai Kalibrasi dalam pemenuhan indikator kinerja “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi” antara lain melalui:

1. Peningkatan ruang lingkup
2. Peningkatan kompetensi laboratorium
3. Peningkatan standar peralatan

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama triwulan 1

1. Peningkatan kompetensi SDM personel kalibrasi melalui bimbingan teknis dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.
2. Monitoring dan evaluasi berkala/triwulan terhadap nilai pemenuhan SKL Balai Kalibrasi, sehingga bisa segera dilakukan intervensi tindak lanjut jika terjadi kendala/permasalahan dalam pemenuhannya.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan sesuai Plan of Action (POA) yaitu Perencanaan peningkatan standar peralatan dengan pengadaan modul GP-10 dan refreshment standar pengukur suhu dan tekanan (valprobe).

IKSK 2. Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar

Alat laboratorium pengujian obat dan makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian obat dan makanan di laboratorium Badan POM, sedangkan yang dimaksud dengan kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar.

Standar yang dimaksud disini adalah sesuai dengan ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Tujuan dari kalibrasi alat laboratorium pengujian adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran ke satuan internasional dan dengan kalibrasi ini dapat pula diketahui seberapa jauh penyimpangan antara nilai standar ukur dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian obat dan makanan yang dimiliki oleh Balai Kalibrasi meliputi:

1. Gaya massa;
2. Volumetrik;
3. Suhu;
4. Instrumen analitik;
5. Tekanan dan laju putar/frekuensi

Pada tahun 2025 Balai Kalibrasi menargetkan persentase alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sebesar 100% dengan jumlah alat sebanyak 3048. Untuk target persentase alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi di triwulan I sebesar 30 % atau setara dengan 915 alat.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 9. Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	30%	27,21%	90,70 %	Baik 

Capaian realisasi indikator kinerja “Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar” triwulan I tahun 2025 termasuk cukup, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{824}{3028} \times 100\% \\ &= 27,21\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{27,21\%}{30\%} \times 100\% \\
 &= 90,70\%
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 10. Realisasi kinerja Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%	27,21	27,21	Kurang 

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian realisasi indikator kinerja triwulan I tahun 2025 “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” sebesar 27,21%, karena target tahunan merupakan target akumulasi.

$$\begin{aligned}
 \% \text{Capaian IKK} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{27,21\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 27,21\%
 \end{aligned}$$

c. Analisis penyebab kegagalan dan rencana tindak lanjut

Realisasi capaian triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan untuk indikator kinerja “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” merupakan target akumulasi.

Tabel 3. 11. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai Besar POM/ Balai POM/ Loka POM

Bulan	Nama Unit Kerja	Sumber Dana	Jumlah Alat
			Sum of Jumlah Alat
01. Januari	PRODUKSI PANGAN OLAHAN	Pusat	3
	JAKARTA	Pusat	99
	JAMBI	Pusat	64
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	Pusat	41
	PPOMN - BBP	Pusat	17
	PPOMN - BPKOM	Pusat	37
	PPOMN - KOBONAPPZA	Pusat	27
	PPOMN - LAB BIOHAZARD	Pusat	10
	PPOMN - MBM	Pusat	37
	PPOMN - OTOKSKK	Pusat	14
	PPOMN - PANGAN & AIR	Pusat	12
	PPOMN - PRODUK BIOLOGI	Pusat	51
02. Februari	BOGOR	Pusat	16
	DUMAI	Pusat	2
	JAKARTA	Pusat	20
	PALANGKARAYA	Pusat	114
	PALU	Pusat	80
	PANGKALPINANG	Pusat	7
	PEKANBARU	Pusat	72
	PPOMN - KOBONAPPZA	Pusat	5
03. Maret	BANJARMASIN	Pusat	18
	DUMAI	Pusat	2
	MATARAM	Pusat	23
	PPOMN - BALAI KALIBRASI	Pusat	1
	PPOMN - KOSMETIK	Pusat	8
	TARAKAN	Pusat	44
Grand Total			824

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama triwulan I

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” antara lain: Kegiatan kalibrasi alat laboratorium yang dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi terhadap hasil evaluasi indikator kinerja “Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar” yaitu pengajuan usulan penyesuaian target alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar ke Biro perencanaan dan keuangan.

Sasaran Kegiatan 2. Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima

IKSK 3. Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai kalibrasi pada tahun ini adalah 4,40.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 12. Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW I (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 13. Realisasi kinerja Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	-	-	-

Realisasi indikator kinerja “Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi” triwulan I tahun 2025 belum ada penilaian dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM.

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal

IKSK 4. Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 14. Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW I (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 15. Realisasi kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	-	-	-

Capaian indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi” ahun 2025 belum ada penilaian dari Inspektorat dan aka dilakukan di akhir tahun.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama triwulan I

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan Monitoring dan evaluasi LKE ZI Balai Kalibrasi setiap triwulan untuk memonitor perolehan nilai pembangunan ZI dan kelengkapan data dukunganya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan.

IKSK 5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penilaian IKPA tahun anggaran 2024 terdiri dari 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Penilaian EKA dihitung dari 4 variabel yaitu Capaian RO, Capaian Sasaran Program, Capaian Sasaran .Strategis, Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran).

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut: $NKA = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$.

Tabel 3. 16. Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW I (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 17. Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	-	-	-

Penilaian realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi” di akhir tahun.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama Triwulan I

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan berikut:

1. Revisi DIPA yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Penyelesaian tagihan yang dilaksanakan tepat waktu maksimal 17 Hari Kerja
3. Pengelolaan UP/TUP dilakukan secara tepat waktu dan akurat
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara rutin agar capaian output dilaporkan tepat waktu dan akurat
5. Surat Perintah Membayar disampaikan tepat waktu sehingga tidak adanya Dispensasi Surat Perintah Membayar

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan meliputi:

1. Deviasi Halaman III DIPA yaitu memperbaiki Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA dengan menyesuaikan/revisi RPD disesuaikan dengan realisasi perbulannya dan RPD bulan berikutnya dibuat sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran yang akan dilakukan.
2. Realisasi anggaran lebih dipertimbangkan terkait target penyerapan anggaran setiap triwulannya

IKSK 6. Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi

ISO 31000:2018 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SPIP dan **standar penerapan manajemen risiko, serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPOM.**

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan

Tabel 3. 18. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	Tidak ada target TW I (target tahunan)	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi target Triwulan terhadap target tahunan

Tabel 3. 19. Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi Triwulan I dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	-	-	-

Capaian dan realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi” akan di nilai di akhir tahun oleh Inspektorat tahun 2025.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja selama triwulan I

Penilaian capaian dan realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi” dilakukan pada akhir tahun. Namun Balai Kalibrasi melakukan upaya untuk memastikan capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target akhir tahun melalui kegiatan berikut: Monitoring dan evaluasi LKE Manajemen Risiko (SPIP) Balai Kalibrasi setiap triwulan untuk memonitor perolehan indeks manajemen risiko dan kelengkapan data dukungnya.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan POA yang telah direncanakan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 20. Tabel realisasi dan capaian (%) anggaran Balai Kalibrasi Triwulan I

KODE/NAMA JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		CAPAIAN (%)	
		SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK	SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK
Belanja Pegawai	1.283.760.000	375.561.063	375.561.063	29.25%	29.25%
Belanja Barang	3.168.618.000	272.734.017	500.734.017	8.61%	18.05%
Belanja Modal	698.142.000		71.228.700	0.00 %	10.20%
Total Pagu (Tanpa Efisiensi)	5.150.520.000	648.294.524	947.523.780	12.59%	18.40%
Pagu Efisiensi	2.697.159.000	648.294.524	947.523.780	24%	35.13%

Untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Balai Kalibrasi , didukung dengan anggaran. Penggunaan anggaran ini perlu dianalisis efisiensinya. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3. 21. Tabel Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 22. Perhitungan Tingkat Efisiensi Triwulan I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Output			Input				IE	SE	TE	Capaian
			Target	Realisasi	% capaian indikator (output)	Target Awal	Target Efisiensi	Realisasi	% capaian anggaran (input)				
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	88,07	89,37	101,48	988.872.000	399.374.000	74.744.700	18,72	5,42	1	4,42	Tidak efisien
3		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	30	27,21	90,70	1.901.932.000	488.906.000	149.648.950	30,61	2,96	1	1,96	Tidak efisien
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,4		akhir tahun	100.000.000	6.218.000	3.045.000	48,97	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
3	Terwujudnya Tata Kelola Balai Kalibrasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75		akhir tahun	770.859.000	509.756.000	344.524.067	67,59	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
4		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4		akhir tahun	1.283.760.000	1.283.760.000	365.540.063	28,47	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun
5		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2		akhir tahun	18.620.000	9.145.000	0	0,00	akhir tahun	1	akhir tahun	akhir tahun

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Balai Kalibrasi menyusun laporan kinerja.

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pemanfaatan data kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Laporan kinerja Balai Kalibrasi sangat bermanfaat bagi Balai Kalibrasi untuk meningkatkan kinerja, melalui antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja,
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja,
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja,
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Organisasi (NKO) Balai kalibrasi tahun 2025 adalah 96,09% dengan predikat kinerja “Baik”.
2. Dari 6 (dua puluh) indikator kinerja Balai Kalibrasi yang diukur, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat baik (capaian $100\% < x \leq 110\%$), dan 1 indikator dengan capaian baik (capaian $70\% \leq x < 90\%$).
3. Anggaran Balai Kalibrasi dari hasil efisiensi tahun 2025 sebesar Rp 2.697.159.000 dengan realisasi sampai akhir bulan maret sebesar Rp 648.294.524 atau sebesar 24 % dari pagu yang dikelola Balai Kalibrasi.

4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Balai Kalibrasi mengoptimalkan pagu efisiensi TA 2025 dengan berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kalibrasi peralatan untuk menjamin kebenaran alat ukur dan sistem pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengujian laboratorium yang valid
2. Balai Kalibrasi berkomitmen dalam meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran melalui pemenuhan capaian target sesuai dengan yang perencanaan.
3. Balai Kalibrasi berkomitmen menindaklanjuti rencana dan pending issue dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Kalibrasi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10580 Indonesia

Telp. (021) 424 4891, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

BADAN POM Email : pomn@pom.go.id; sekretariatpomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

KEPALA BALAI KALIBRASI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI

NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KALIBRASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Kalibrasi pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kalibrasi tentang Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI TAHUN 2025
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Kalibrasi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA BALAI KALIBRASI,



HENRY HANDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI
NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,51
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,25
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	90
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	3,2

KEPALA BALAI KALIBRASI,

HENRY HANDOYO

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Kalibrasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KALIBRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY HANDOYO

Jabatan : Kepala Balai Kalibrasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUSAN GRACIA ARPAN

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi

HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional

SUSAN GRACIA ARPAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89.37 Nilai
		06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100 Persen
2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	4.4 Indeks
3.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75 Nilai
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4 Nilai
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,064,043,000 (Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000
2.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	2,990,804,000
3.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,023,239,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai
Kalibrasi


HENRY HANDOYO

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional


SUSAN GRACIA ARPAN

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Kalibrasi



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KALIBRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi			88.07	88.07	88.07	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	89.37	988,872,000	
			NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			B - Pelatihan Dalam Negeri Balai Kalibrasi			45,120,000		45,120,000		
			2.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			G - Perencanaan Pemenuhan Peralatan Laboratorium BPOM			253,060,000		253,060,000		
			3.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			C - Pelatihan Internal Balai Kalibrasi			22,550,000		22,550,000		
			4.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium			668,142,000		668,142,000		
			06 - Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar			30	30	30	50	50	50	80	80	80	100	1,901,932,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			H - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alat Laboratorium BPOM			65,310,000		65,310,000	
		2.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			D - Penerapan Sistem Mutu Balai Kalibrasi			83,155,000		83,155,000	
		3.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			E - Pemeliharaan Alat Laboratorium			150,000,000		150,000,000	
		4.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			F - Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium			52,719,000		52,719,000	
		5.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			I - Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium BPOM			1,417,268,000		1,417,268,000	
		6.	DR.4133.BIA.001 - Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar			051 - Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium			A - Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium			133,480,000		133,480,000	
2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima											4.4	100,000,000	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			B - Publikasi Pelayanan Publik			10,000,000		10,000,000	
		2.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			C - Inovasi Pelayanan Publik			23,236,000		23,236,000	
		3.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan			A - Forum Komunikasi Publik Balai Kalibrasi			66,764,000		66,764,000	

2.	06 - Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi yang prima											4.4	100,000,000																							
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>B - Publikasi Pelayanan Publik</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>C - Inovasi Pelayanan Publik</td><td>23,236,000</td><td>23,236,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan</td><td>A - Forum Komunikasi Publik Balai Kalibrasi</td><td>66,764,000</td><td>66,764,000</td></tr></table>												NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	B - Publikasi Pelayanan Publik	10,000,000	10,000,000	2.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	C - Inovasi Pelayanan Publik	23,236,000	23,236,000	3.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	A - Forum Komunikasi Publik Balai Kalibrasi	66,764,000	66,764,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																
1.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	B - Publikasi Pelayanan Publik	10,000,000	10,000,000																																
2.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	C - Inovasi Pelayanan Publik	23,236,000	23,236,000																																
3.	DR.4133.BAH.004 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	051 - Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	A - Forum Komunikasi Publik Balai Kalibrasi	66,764,000	66,764,000																																
3.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi											75	745,859,000																							
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi</td><td>50,000,000</td><td>25,000,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td>C - Administrasi Kegiatan Perkantoran</td><td>720,859,000</td><td>720,859,000</td></tr></table>												NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi	50,000,000	25,000,000	2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Administrasi Kegiatan Perkantoran	720,859,000	720,859,000						
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi	50,000,000	25,000,000																																
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Administrasi Kegiatan Perkantoran	720,859,000	720,859,000																																
		11 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi											4	1,283,760,000																							

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT Balai Kalibrasi		1,283,760,000		1,283,760,000				
		12 - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi										2	43,620,000		
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Perawatan Sarana		6,620,000		6,620,000				
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi		50,000,000		25,000,000				
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Perawatan Peralatan Kantor		5,000,000		5,000,000				
		4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN		A - Pengelolaan Barang Milik Negara		7,000,000		7,000,000				
		Total											5,064,043,000		

Jakarta, 12 February 2025

Kepala Balai Kalibrasi



HENRY HANDOYO

Lampiran 4. Surat Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.101 Jakarta, 14 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data Penyesuaian Besaran
Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi
Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM
3. Para Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besar Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025, bersama ini kami meminta seluruh unit kerja di lingkungan BPOM baik di Pusat dan UPT agar dapat melakukan pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja yang dapat dilihat pada link : sites.google.com/view/penganggaranbadanpom > Menu Input Informasi > LAMPIRAN RINCIAN EFISIENSI PENGHEMATAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pemblokiran anggaran secara mandiri dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sumber dana efisiensi berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB baik dari belanja Operasional maupun Non Operasional.
2. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
3. Belanja Pegawai tidak termasuk untuk dilakukan efisiensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kegiatan Belanja Barang maupun Belanja Modal dapat dilakukan efisiensi melalui pemblokiran antara lain :
 - a. Menunda belanja modal (seperti : renovasi dan pembangunan gedung, pengadaan peralatan mesin termasuk kendaraan operasional/jabatan, pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, dll);
 - b. Mengurangi secara signifikan belanja konsumsi rapat, ATK, dan pencetakan (diarahkan ke *paperless*);
 - c. Meniadakan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publikasi
 - d. Rapat, seminar, *focus group discussion*, sosialisasi, diseminasi, pelatihan dilakukan secara daring;
 - e. Meniadakan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara fisik/luring dan mengoptimalkan pemanfaatan media daring;
 - f. Mengurangi secara signifikan pelaksanaan konsinyering, pemberian seminar kit, dan lain-lain;
 - g. Mengurangi secara signifikan pengadaan jasa lainnya dan Jasa Konsultan;
 - h. Pembatasan perjalan dalam dan luar negeri secara sangat selektif;
 - i. Efisiensi dan penundaan belanja TIK yang tidak terkait *core system* seperti lisensi aplikasi pendukung, pengadaan perangkat pengguna, pembaruan *hardware*, dll;
 - j. Efisiensi belanja daya dan jasa serta belanja pemeliharaan hanya dilakukan untuk aset yang penting;
 - k. Melakukan penyesuaian target output secara proporsional dengan sisa anggaran yang tersedia di masing-masing satker. Hasil exercise penyesuaian target output agar disampaikan melalui tautan :
 - a. <https://bit.ly/efisiensi-UPT-2025> untuk Balai Besar/Balai/Loka POM
 - b. <https://bit.ly/efisiensi-Pusat-2025> untuk Unit Kerja Pusat BPOM
5. Sisa anggaran yang tersedia pada masing-masing satuan kerja di prioritaskan untuk pemenuhan belanja operasional, khususnya untuk pembayaran LTGA, Sewa antara lain gedung kantor, Tenaga *outsourcing*, Pemeliharaan yang bersifat mendesak, serta untuk pembayaran kegiatan yang sudah direalisasikan sampai dengan akhir bulan Januari 2025 agar tidak terjadi pagu minus.
6. Melakukan moratorium pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi dan renovasi pada tahun 2025 akibat adanya efisiensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Terpadu Tahun 2025, dengan adanya efisiensi anggaran belanja, maka setiap Unit Kerja Pusat penanggungjawab kegiatan untuk dapat berkoordinasi dengan UPT terkait efisiensi pelaksanaan kegiatan terpadu yang akan dilakukan.

Efisiensi belanja dilakukan melalui mekanisme pemblokiran secara mandiri dengan mencantumkan kode blokir "A" (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada aplikasi SAKTI masing-masing Satker. Usulan efisiensi melalui SAKTI, dilengkapi data dukung berupa:

- a. Surat penyampaian efisiensi dari KPA;
- b. Matriks semula menjadi perubahan revisi yang dilakukan (sampai dengan level detail);
- c. Matriks semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA; dan
- d. RKA Satker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;

Usulan agar dapat disampaikan selambat-lambatnya hari Selasa, 18 Februari 2025 melalui <https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/> pada menu Usulan Revisi Anggaran TA 2025.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Sekretaris Utama,



JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Laporan Ketersediaan Dana Detail s/d Maret TA 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2025

Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Satuan Kerja : 691155 BALAI KALIBRASI

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,697,159,000	0	636,314,205	301,188,575	937,502,780	34.76 %	1,759,656,220
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	911,737,000	0	143,925,660	90,027,380	233,953,040	25.66 %	677,783,960
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	17,239,000	0	6,514,390	0	6,514,390	37.79 %	10,724,610
BKB Pemantauan produk	17,239,000	0	6,514,390	0	6,514,390	37.79 %	10,724,610
BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	17,239,000	0	6,514,390	0	6,514,390	37.79 %	10,724,610
051 koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	17,239,000	0	6,514,390	0	6,514,390	37.79 %	10,724,610
051.0A Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Kalibrasi	17,239,000	0	6,514,390	0	6,514,390	37.79 %	10,724,610
521211 Belanja Bahan	10,500,000	0	0	0	0	0.00 %	10,500,000
000002. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	5,700,000	0	0	0	0	0.00 %	5,700,000
000003. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	4,800,000	0	0	0	0	0.00 %	4,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,739,000	0	6,514,390	0	6,514,390	96.67 %	224,610
000005. Uang Transport	4,779,000	0	4,554,390	0	4,554,390	95.30 %	224,610
000006. Penginapan	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
000007. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	100.00	0
DR.4133 Pengujian Obat dan Makanan	894,498,000	0	137,411,270	90,027,380	227,438,650	25.43 %	667,059,350
BAH Pelayanan Publik Lainnya	6,218,000	0	3,045,000	0	3,045,000	48.97 %	3,173,000
BAH.004 Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	6,218,000	0	3,045,000	0	3,045,000	48.97 %	3,173,000
051 Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan	6,218,000	0	3,045,000	0	3,045,000	48.97 %	3,173,000
051.0C Inovasi Pelayanan Publik	6,218,000	0	3,045,000	0	3,045,000	48.97 %	3,173,000
521211 Belanja Bahan	6,218,000	0	3,045,000	0	3,045,000	48.97 %	3,173,000
000018. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	1,920,000	0	1,425,000	0	1,425,000	74.22 %	495,000
000019. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,280,000	0	1,620,000	0	1,620,000	71.05 %	660,000
000020. Biaya Pencetakan	2,018,000	0	0	0	0	0.00 %	2,018,000
BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	493,106,000	0	134,366,270	18,798,680	153,164,950	31.06 %	339,941,050
BIA.001 Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	493,106,000	0	134,366,270	18,798,680	153,164,950	31.06 %	339,941,050
051 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Laboratorium	493,106,000	0	134,366,270	18,798,680	153,164,950	31.06 %	339,941,050

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2025

Kementerian : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Unit Organisasi : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Satuan Kerja : 691155 **BALAI KALIBRASI**

Hal 2 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A	Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium	104,500,000	0	0	0	0	0.00 %	104,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
	000022. Belanja Jasa Rekalibrasi Alat Standar	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	0	0	0	0	0.00 %	4,500,000
	000024. Transport	4,500,000	0	0	0	0	0.00 %	4,500,000
051.0D	Penerapan Sistem Mutu Balai Kalibrasi	43,864,000	0	1,500,000	0	1,500,000	3.42 %	42,364,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	7.69 %	18,000,000
	000038. Biaya Uji Banding Laboratorium Kalibrasi	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
	000039. Surveilans Akreditasi	10,500,000	0	0	0	0	0.00 %	10,500,000
	000040. Iuran Tahunan BSN	3,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	50.00 %	1,500,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,364,000	0	0	0	0	0.00 %	24,364,000
	000041. Reagen / Bahan Fungsional	24,364,000	0	0	0	0	0.00 %	24,364,000
051.0E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	75,000,000	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,000,000	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000
	000046. Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	75,000,000	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000
051.0G	Perencanaan Pemenuhan Peralatan Laboratorium BPOM	4,200,000	0	576,000	2,940,000	3,516,000	83.71 %	684,000
521211	Belanja Bahan	4,200,000	0	576,000	2,940,000	3,516,000	83.71 %	684,000
	000053. Makan Rapat Biasa DKI Jakarta	2,280,000	0	0	1,596,000	1,596,000	70.00 %	684,000
	000054. Snack Rapat Biasa DKI Jakarta	1,920,000	0	576,000	1,344,000	1,920,000	100.00 %	0
051.0H	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alat Laboratorium BPOM	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
	000068. Maintenance/Updating Aplikasi DIKOLABORASI	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
051.0I	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium BPOM	250,542,000	0	132,290,270	15,858,680	148,148,950	59.13 %	102,393,050
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,742,000	0	122,110,270	15,858,680	137,968,950	60.58 %	89,773,050
	000180. Uang Transport	86,622,000	0	52,945,270	4,246,180	57,191,450	66.02 %	29,430,550
	000181. Uang Harian	61,920,000	0	28,680,000	4,920,000	33,600,000	54.26 %	28,320,000
	000182. Penginapan	79,200,000	0	40,485,000	6,692,500	47,177,500	59.57 %	32,022,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2025

Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Satuan Kerja : 691155 BALAI KALIBRASI

Hal 3 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,800,000	0	10,180,000	0	10,180,000	44.65 %	12,620,000
	000088. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I. Jakarta)	12,600,000	0	5,250,000	0	5,250,000	41.67 %	7,350,000
	000089. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	10,200,000	0	4,930,000	0	4,930,000	48.33 %	5,270,000
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	395,174,000	0	0	71,228,700	71,228,700	18.02 %	323,945,300
CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan	395,174,000	0	0	71,228,700	71,228,700	18.02 %	323,945,300
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	395,174,000	0	0	71,228,700	71,228,700	18.02 %	323,945,300
053.0A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	395,174,000	0	0	71,228,700	71,228,700	18.02 %	323,945,300
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395,174,000	0	0	71,228,700	71,228,700	18.02 %	323,945,300
	000091. Modular GP 10	114,000,000	0	0	71,228,700	71,228,700	62.48 %	42,771,300
	000187. Mesin Fotocopy	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
	000188. Valprobe	198,000,000	0	0	0	0	0.00 %	198,000,000
	000191. Evaporation Trap For Balance	71,174,000	0	0	0	0	0.00 %	71,174,000
WA Program Dukungan Manajemen		1,785,422,000	0	492,388,545	211,161,195	703,549,740	39.41 %	1,081,872,260
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,785,422,000	0	492,388,545	211,161,195	703,549,740	39.41 %	1,081,872,260
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,785,422,000	0	492,388,545	211,161,195	703,549,740	39.41 %	1,081,872,260
EBA.956	Layanan BMN	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
054	Penatausahaan BMN	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
054.0A	Pengelolaan Barang Milik Negara	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
521211	Belanja Bahan	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
	000134. Pencetakan/Penggandaan/Penjilidan	1,750,000	0	0	0	0	0.00 %	1,750,000
	000136. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,850,000	0	0	0	0	0.00 %	2,850,000
	000137. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1,778,422,000	0	492,388,545	211,161,195	703,549,740	39.56 %	1,074,872,260
001	Gaji dan Tunjangan	1,283,760,000	0	181,195,912	184,344,151	365,540,063	28.47 %	918,219,937
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT Balai Kalibrasi	1,283,760,000	0	181,195,912	184,344,151	365,540,063	28.47 %	918,219,937
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	879,827,000	0	132,841,800	130,671,900	263,513,700	29.95 %	616,313,300

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2025

Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Satuan Kerja : 691155 BALAI KALIBRASI

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000092. Belanja Gaji Pokok Pegawai	879,827,000	0	132,841,800	130,671,900	263,513,700	29.95 %	616,313,300
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	65,000	0	1,814	1,931	3,745	5.76 %	61,255
000093. Belanja Pembulatan Gaji PNS	65,000	0	1,814	1,931	3,745	5.76 %	61,255
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,395,000	0	9,085,260	9,431,950	18,517,210	32.26 %	38,877,790
000094. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,395,000	0	9,085,260	9,431,950	18,517,210	32.26 %	38,877,790
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	9,971,000	0	1,472,320	1,611,266	3,083,586	30.93 %	6,887,414
000095. Belanja Tunj. Anak PNS	9,971,000	0	1,472,320	1,611,266	3,083,586	30.93 %	6,887,414
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	24,661,000	0	3,600,000	3,600,000	7,200,000	29.20 %	17,461,000
000096. Belanja Tunj. Struktural PNS	24,661,000	0	3,600,000	3,600,000	7,200,000	29.20 %	17,461,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	123,981,000	0	18,100,000	18,100,000	36,200,000	29.20 %	87,781,000
000097. Belanja Tunj. Fungsional PNS	123,981,000	0	18,100,000	18,100,000	36,200,000	29.20 %	87,781,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	2,236,000	0	389,798	4,354,924	4,744,722	212.20	-2,508,722
000098. Belanja Tunj. PPh PNS	2,236,000	0	389,798	4,354,924	4,744,722	212.20	-2,508,722
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	36,725,000	0	5,503,920	5,721,180	11,225,100	30.57 %	25,499,900
000099. Belanja Tunj. Beras PNS	36,725,000	0	5,503,920	5,721,180	11,225,100	30.57 %	25,499,900
511129 Belanja Uang Makan PNS	130,764,000	0	9,947,000	10,597,000	20,544,000	15.71 %	110,220,000
000100. Belanja Uang Makan PNS	130,764,000	0	9,947,000	10,597,000	20,544,000	15.71 %	110,220,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	2,535,000	0	0	0	0	0.00 %	2,535,000
000101. Belanja Tunjangan Umum PNS	2,535,000	0	0	0	0	0.00 %	2,535,000
512211 Belanja Uang Lembur	15,600,000	0	254,000	254,000	508,000	3.26 %	15,092,000
000140. Uang Lembur Golongan III	7,560,000	0	254,000	180,000	434,000	5.74 %	7,126,000
000141. Uang Lembur Golongan IV	1,728,000	0	0	0	0	0.00 %	1,728,000
000143. Uang Makan Lembur Golongan III	5,328,000	0	0	74,000	74,000	1.39 %	5,254,000
000144. Uang Makan Lembur Golongan IV	984,000	0	0	0	0	0.00 %	984,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	494,662,000	0	311,192,633	26,817,044	338,009,677	68.33 %	156,652,323
002.0A Perawatan Sarana	2,145,000	0	0	0	0	0.00 %	2,145,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,145,000	0	0	0	0	0.00 %	2,145,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2025

Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Satuan Kerja : 691155 BALAI KALIBRASI

Hal 5 dari 5

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	ANGGARAN
	000103. Pemeliharaan AC Balai Kalibrasi	2,145,000	0	0	0	0	0.00 %	2,145,000
002.0C	Administrasi Kegiatan Perkantoran	492,517,000	0	311,192,633	26,817,044	338,009,677	68.63 %	154,507,323
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	144,299,000	0	25,428,083	21,587,044	47,015,127	32.58 %	97,283,873
	000146. Keperluan Sehari-hari Perkantoran	3,847,000	0	3,841,039	0	3,841,039	99.85 %	5,961
	000156. Honorarium PPNPN	129,657,000	0	21,587,044	10,793,522	32,380,566	24.97 %	97,276,434
	000190. Tunjangan Hari Raya PPNPN	10,795,000	0	0	10,793,522	10,793,522	99.99 %	1,478
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25,378,000	0	6,444,550	0	6,444,550	25.39 %	18,933,450
	000158. Penambah Daya Tahan Tubuh (DKI Jakarta)	25,378,000	0	6,444,550	0	6,444,550	25.39 %	18,933,450
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,240,000	0	5,720,000	5,230,000	10,950,000	22.24 %	38,290,000
	000114. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	1,200,000	0	150,000	150,000	300,000	25.00 %	900,000
	000115. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	1,200,000	0	150,000	150,000	300,000	25.00 %	900,000
	000117. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	1,440,000	0	180,000	180,000	360,000	25.00 %	1,080,000
	000118. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	15,880,000	0	1,550,000	1,370,000	2,920,000	18.39 %	12,960,000
	000120. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12,080,000	0	1,510,000	1,330,000	2,840,000	23.51 %	9,240,000
	000121. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	4,160,000	0	520,000	470,000	990,000	23.80 %	3,170,000
	000122. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	6,240,000	0	780,000	700,000	1,480,000	23.72 %	4,760,000
	000123. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5,440,000	0	680,000	680,000	1,360,000	25.00 %	4,080,000
	000125. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,600,000	0	200,000	200,000	400,000	25.00 %	1,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	273,600,000	0	273,600,000	0	273,600,000	100.00	0
	000133. Pengadaan Outsourcing (Resepsionis dan CS)	273,600,000	0	273,600,000	0	273,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.